



Kontribusi Destinasi Wisata dalam Mengoptimalkan Retribusi Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi

Nursya'diah^{1*}, Rini Elvira², Iiz Izmuddin³, Zuwardi⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

*Korespondensi Penuis: nsdiah0104@gmail.com¹

Abstract. The background of this research is the tendency for retribution realization from tourist destinations in Bukittinggi City to be consistently below its target. The study aims to measure the contribution of tourist destinations in optimizing the retribution of the Bukittinggi City Tourism Office. The research uses a descriptive quantitative method, collecting secondary data from the Bukittinggi City Tourism Office (2015-2024) and primary data (interviews and observations). The research objects include the Kinantan Wildlife and Cultural Park (TMSBK) and the Japanese Cave Panorama Park (TPLJ). The results show that the contribution of tourist destinations to retribution is quite significant, with the highest percentage reaching 49.39% in 2024 and an average of 50.51% in the "very good" category. However, this contribution still shows yearly fluctuations and is not yet optimal. The internal management of retribution faces major challenges, including illegal parking and the use of conventional payment systems. This research concludes that the optimization of retribution not only depends on internal performance but also requires a management system that upholds justice, transparency, and public benefit. The implication of this research is the importance of evaluating data to identify strengths and weaknesses in the retribution management system, in order to support the annual achievement of optimal retribution.

Keywords: Bukittinggi City; Contribution; Retribution; Tourism Sector Revenue; Tourist Destinations

Abstrak. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya kecenderungan realisasi retribusi dari destinasi wisata di Kota Bukittinggi yang masih kurang dari target. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kontribusi destinasi wisata dalam mengoptimalkan retribusi Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, dengan pengumpulan data sekunder dari Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi (tahun 2015-2024) serta data primer (wawancara dan observasi). Objek penelitian meliputi Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) serta Taman Panorama Lubang Jepang (TPLJ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi destinasi wisata terhadap retribusi cukup signifikan, dengan persentase tertinggi mencapai 49,39% pada tahun 2024 dan rerata 50,51% pada kategori sangat baik. Namun, kontribusi ini masih menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya dan belum optimal. Pengelolaan internal retribusi masih menghadapi tantangan besar, termasuk Parkir Ilegal dan penggunaan baiji konvensional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimisasi retribusi tidak hanya bergantung pada kinerja internal, tetapi juga membutuhkan sistem pengelolaan yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya mengevaluasi data untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengelolaan retribusi, guna mendukung tercapainya retribusi yang optimal setiap tahunnya.

Kata kunci: Destinasi Wisata; Kontribusi; Kota Bukittinggi; Pendapatan Sektor Pariwisata; Retribusi

1. LATAR BELAKANG

Sektor pariwisata telah lama diakui sebagai pilar penting dalam perekonomian suatu daerah, tidak hanya berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong pembangunan infrastruktur. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) dalam berbagai konferensi, pariwisata berperan sebagai faktor pengembangan ekonomi dan sumber devisa, serta katalis untuk pengembangan wilayah. Secara spiritual, Al-Qur'an pun menjelaskan bahwa perjalanan adalah perintah untuk memahami dan mengambil pelajaran dari ciptaan Allah, seperti yang difirmankan dalam Q.S. Al-Mulk ayat 15. Sumatera Barat, dengan keindahan alam dan

budayanya, merupakan salah satu destinasi wisata utama di Indonesia. Kota Bukittinggi, khususnya, telah ditetapkan sebagai kota wisata dan pengembangan pariwisata di provinsi tersebut. Dengan banyaknya destinasi wisata yang menarik, pariwisata di Bukittinggi berpotensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor retribusi.

Meskipun memiliki potensi besar, realisasi retribusi dari destinasi wisata di Kota Bukittinggi menunjukkan fluktuasi yang tidak stabil, bahkan sering kali tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa optimalisasi retribusi masih belum maksimal. Fenomena ini terlihat jelas pada data realisasi retribusi dari tahun 2015 hingga 2024, di mana capaiannya kerap kali berada di bawah target yang ditetapkan.

Tabel 1. Realisasi Retribusi Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi Tahun 2015-2024.

Tahun	Target	Realisasi Retribusi	%	Keterangan
2015	Rp.10.000.000.000	Rp.8.748.597.000	0,87%	Kurang dari target
2016	Rp.10.080.000.000	Rp.11.086.016.000	0,92%	Lebih dari target
2017	Rp.15.000.000.000	Rp.15.652.870.182	1,04%	Lebih dari target
2018	Rp.18.000.000.000	Rp. 16.603.543.121	0,92%	Kurang dari target
2019	Rp.20.000.000.000	Rp. 15.697.261.582	0,78%	Kurang dari target
2020	Rp.12.000.000.000	Rp. 10. 805.080.957	0,90%	Kurang dari target
2021	Rp.14.000.000.000	Rp. 16.737.070.000	1,20%	Lebih dari target
2022	Rp.20.200.000.000	Rp. 27.646.171.346	1,37%	Lebih dari target
2023	Rp.32.692.160.000	Rp. 22.706.416.500	1,08%	Kurang dari target
2024	Rp.30.000.000.000	Rp. 17.557.887.000	0,58%	Kurang dari target

Sumber: (Dinas Pariwisata Kota Bukitnggi, 2025)

Data pada Tabel 1 di atas menunjukkan adanya ketidakstabilan dan kecenderungan realisasi yang tidak mencapai target, meskipun destinasi wisata seperti Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) dan Taman Panorama Lobang Jepang (TPLJ) memberikan kontribusi yang signifikan. Di samping itu, tantangan lain muncul dari perspektif pariwisata syariah, yang menjadi fokus dalam konteks kebudayaan Minangkabau yang berlandaskan filosofi 'Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah'. Penelitian ini mengidentifikasi adanya ketidakselarasan dalam pengelolaan retribusi, seperti praktik parkir ilegal yang merugikan pendapatan daerah dan penggunaan bank konvensional untuk penyetoran hasil retribusi, yang keduanya bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam pariwisata syariah.

Menyadari kesenjangan antara potensi dan realisasi serta tantangan dalam penerapan prinsip pariwisata syariah, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Penelitian ini mengukur kontribusi spesifik dari dua destinasi wisata utama di Bukittinggi (TMSBK dan TPLJ) terhadap retribusi daerah, berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat makro dan tidak mendalam mengkaji mekanisme retribusi di tingkat mikro). Selain itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis kuantitatif, tetapi juga mengkaji praktik pengelolaan retribusi agar dapat dioptimalkan selaras dengan prinsip-prinsip pariwisata syariah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan memadukan analisis kuantitatif tentang kontribusi retribusi dengan tinjauan deskptifnya dari perspektif syariah, memberikan rekomendasi yang lebih holistik untuk perbaikan sistem pengelolaan. Berdasarkan konteks dan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung besaran nilai kontribusi destinasi wisata dalam mengoptimalkan retribusi Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi dan mengevaluasi bagaimana praktik pengelolaan retribusi dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip pariwisata syariah. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dan akademisi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan beretika di sektor pariwisata.

2. KAJIAN TEORITIS

Keuangan Publik

Keuangan publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas mengenai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola keuangan dan sumber daya publiknya. Keuangan publik menganalisis hasil dari kinerja pemerintah melalui kebijakan fiskal, pendapatan dan pengeluaran pemerintah, manajemen utang publik, efeisisensi dan efektivitas anggaran, dan bagaimana dampak alokasi anggaran pemerintah terhadap perekonomian masyarakat secara keseluruhan.

Keuangan publik dalam konteks syari'ah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam bermu'amalah, khususnya dalam relasi negararakyat. Dalam arti, hubungan manusia dengan manusia yang lain memiliki ruang yang bebas, namun hubungan ini memiliki nilai transenden sebagai bentuk kegiatan ekonomi yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Jadi, kebebasan manusia, realitas ekonomi, dan akuntabilitas kepada Allah menjadi kerangka kerja bagi para pelaku ekonomi, termasuk penguasa, sehingga kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak dapat dilepaskan dari bagaimana niat – amal (aksi) - tujuan bisnis. Realitas inilah yang mendasari aktivitas ekonomi harus

dikonsepsikan dari epistemologi tauhidi dalam arti kegiatan ekonomi berkaitan erat dengan konsep ketuhanan, yaitu Allah sebagai *Realitas Absolut*.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah.

- a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu:
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- b. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas.
- c. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Retribusi

Salah satu sumber penerimaan suatu negara adalah retribusi. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah. Retribusi itu berdasar pula atas peraturan peraturan yang berlaku umum. Retribusi destinasi pariwisata adalah merupakan sumber penerimaan destinasi pariwisata yang berasal dari retribusi karcis masuk, retribusi parkir dan pendapatan lain-lain yang sah berasal dari objek pariwisata tersebut.

Menurut Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa

atu pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi tempat rekreasi dan olahraga didefinisikan sebagai retribusi yang dibayarkan untuk dapat memperoleh manfaat atas tempat rekreasi dan olahraga yang diusahakan oleh pemerintah daerah secara mandiri maupun kerja sama. Hal ini dapat diartikan bahwa pelayanan atas tempat rekreasi dan olahraga yang tidak diusahakan oleh pemerintah daerah maka tidak termasuk ke dalam objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga

Pariwisata

Pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua kata yaitu kata “pari” dan “wisata”. Kata “pari” berarti penuh, seluruh, atau semua sedangkan kata “wisata” berarti perjalanan. Organisasi pariwisata didunia, UNWTO (*United Nations World Tourism Organization*) mendefinisikan pariwisata sebagai aktivitas perjalanan dan tinggal seseorang diluar tempat tinggal dan lingkungannya selama tidak lebih dari selama satu tahun berurutan untuk berwisata, bisnis, atau tujuan lain dengan tidak untuk bekerja ditempat yang dikunjungi tersebut.

Dalam pandangan Islam, pariwisata diwujudkan dalam hal perjalanan spiritual, tentang pemaknaan dan pencapaian sebuah tuntutan ajaran agama itu sendiri "syariah" Pariwisata adalah salah satu sarana untuk mengembangkan konsep ekonomi islam yang diambil dari Al-Quran. Allah telah memberikan isyarat manusia untuk melakukan perjalanan yang tujuannya adalah untuk memperkuat iman dan keyakinan serta memberikan motivasi. Dengan gerakan ini setidaknya bisa membuka jalan untuk pengembangan syariah.

Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Penerimaan Retribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan retribusi pariwisata. Kontribusi retribusi pariwisata dalam Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi pariwisata dengan target retribusi kemudian dikalikan 100.¹ Untuk perhitungan kontribusi retribusi sektor pariwisata dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{x}{y} \times 100\%$$

Keterangan

x: realisasi retribusi

y: total pendapatan sektor pariwisata

Hasil perhitungan rasio kontribusi ini kemudian diklasifikasikan menggunakan kriteria kontribusi tertentu untuk menentukan sejauh mana kontribusi destinasi wisata tersebut berada dalam kategori sangat baik, baik, cukup, kurang, atau sangat kurang.

Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Kontribusi.

Rasio Kontribusi %	Kriteria Kontribusi
Kurang dari 0%	Sangat Kurang
Diatas 10%-20%	Kurang
Diatas 20%-30%	Sedang
Diatas 30%-40%	Cukup
Diatas 40%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: (Kepmendagri, 1996)

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah kuantitatif deskriptif karena data penelitian berupa angka angka yang kemudiakan dijabarkan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data realisasi penerimaan retribusi destinasi wisata kota bukittinggi yakni TMSBK dan TLPJ dalam kurun waktu dari 2015-2024 dan data primer berupa hasil wawancara terstruktur dengan mengajukan pertanyaan kepada informan penelitian yakni Kepala Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi, Staff Bidang Destinasi Wisata, dan Penjaga Tiket Destinasi Wisata TMSBK dan TLPJ. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini untuk memperkuat hasil penelitian penulis.

Analisis data penelitian ini menggunakan rumus rasio kontribusi dan kemudian diklasifikasikan menggunakan kriteria kontribusi tertentu untuk menentukan sejauh mana kontribusi destinasi wisata tersebut berada dalam kategori sangat baik, baik, cukup, kurang, atau sangat kurang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dari staff Destinasi wisata dan Industri disebutkan bahwa Kota Bukittinggi dikenal sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan di Sumatera Barat, menawarkan beragam daya tarik mulai dari keindahan alam, peninggalan sejarah, hingga pesona budaya. Di antara berbagai destinasi yang ada, Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan (Kebun Binatang Kinantan) dan Lobang Jepang merupakan dua objek wisata utama yang secara konsisten menjadi penyumbang retribusi signifikan bagi Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi.

Daya tarik utama dari Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan adalah koleksi satwanya dimana taman marga satwa dan budaya kinantan menampung berbagai jenis satwa, baik endemik maupun non-endemik, yang menarik minat pengunjung dari berbagai usia. Dan ada Rumah Adat Baanjuang yang menampilkan koleksi benda-benda bersejarah dan kebudayaan Minangkabau. Daya tarik utama dari Lobang Jepang adalah nilai Sejarahnya yang menjadi saksi bisu sejarah Perang Dunia II di Indonesia, memberikan pengalaman unik dan edukatif bagi pengunjung tentang masa lalu.

Berdasarkan Perda No 8 tahun 2023 Tarif Masuk Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan. Dapat dilihat pada gambar 1:



Gambar 1. Tarif Tiket Masuk Taman Marga Satwa

Sumber: (Hasil penelitian,2025)

Berdasarkan Perda No 8 tahun 2023 Tarif Masuk Taman Panorama Lobang Jepang Dapat dilihat pada gambar 2:



Gambar 2. Tarif Tiket Masuk Taman Panorama Lobang Jepang

Sumber: (Hasil penelitian,2025)

Hasil analisis kuantitatif menggunakan rumus rasio kontribusi selama 10 tahun (2015-2024) menunjukkan besarnya peran Destinasi Wisata Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) dan Taman Panorama Lobang Jepang (TPLJ) dalam mengoptimalkan Retribusi Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi sebagai berikut.

Tabel 3. Kontribusi Destinasi Wisata Dalam Mengoptimalkan Retribusi Dispar Tahun 2015-2024

Tahun	Realisasi Retribusi	Pendapatan Sektor Pariwisata	Kontribusi %	Kriteria
2015	Rp.8.748.597.000	Rp. 22.492.194.491	38,90%	Cukup
2016	Rp.11.086.016.000	Rp. 26.409.323.257	47,97%	Baik
2017	Rp.15.652.870.182	Rp. 37.053.422.401	42,24%	Baik
2018	Rp. 16.603.543.121	Rp. 37.421.007.114	44,37%	Baik
2019	Rp. 15.697.261.582	Rp. 38.091.536.042	41,21%	Baik
2020	Rp. 10. 805.080.957	Rp. 19.893.514.835	54,31%	Sangat Baik
2021	Rp. 16.737.070.000	Rp. 35.798.805.556	46,75%	Baik
2022	Rp. 27.646.171.346	Rp. 51.709.557.462	53,46%	Sangat Baik
2023	Rp. 22.706.416.500	Rp. 47.720.265.436	47,58%	Baik
2024	Rp. 17.557.887.000	Rp. 19.864.109.150	88,39%	Sangat Baik
Rata rata			50,51%	Sangat Baik

Sumber : (Hasil Penelitian , 2025)

Hasil menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi TMSBK dan TPLJ mencapai 50,51% dengan kriteria Sangat Baik. Angka ini menegaskan bahwa dua destinasi ini adalah penggerak utama dan pilar vital dalam sistem penerimaan retribusi Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi. Secara teoretis, retribusi adalah salah satu bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan untuk pembangunan dan pelayanan publik (Darwin, 2016). Kontribusi di atas 50% menunjukkan bahwa kinerja retribusi sangat bergantung pada performa dan kunjungan di dua lokasi tersebut.

Adanya fluktuasi tahunan—termasuk rasio kontribusi yang tetap tinggi di Tahun 2020 (54,31%) saat pandemi—menunjukkan bahwa meskipun volume pengunjung menurun, kedua destinasi ini memiliki daya tahan retribusi yang lebih kuat dibandingkan sektor pariwisata lainnya. Rasio kontribusi yang melonjak tinggi pada Tahun 2024 (88,39%) mengindikasikan adanya penurunan drastis pada basis perbandingan (Total Pendapatan Sektor Pariwisata).

Berdasarkan hasil wawancara bersama staf Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata diketahui bahwa Destinasi Wisata yang dikelola oleh dinas pariwisata memiliki kontribusi positif dalam mengoptimalkan retribusi Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi. Hal ini sejalan dengan hasil pengolahan data yang penulis dapatkan bahwa terlihat Destinasi Wisata

telah berkontribusi secara positif dan tergolong baik dalam mengoptimalkan retribusi dinas pariwisata kota Bukittinggi. Staff destinasi dan industri pariwisata juga mengatakan bahwa realisasi retribusi destinasi wisata serta pendapatan dibidang sektor pariwisata sering mengalami fluktuatif disebabkan oleh faktor jumlah kunjungan wisatawan, iklim, infrastruktur dan faktor dari promosi

Temuan ini bertolak belakang dengan beberapa penelitian di wilayah lain yang sering menemukan kontribusi retribusi wisata tergolong rendah terhadap PAD secara keseluruhan (Hermin,2024). Tingginya rasio kontribusi di Bukittinggi menunjukkan efektivitas pengelolaan dua objek wisata ini, namun juga mencerminkan adanya risiko, di mana jika terjadi penurunan signifikan pada dua objek ini, stabilitas retribusi dinas akan terancam.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan destinasi wisata berdasarkan prinsip syariah, yaitu dua destinasi wisata yang diteliti menunjukkan upaya baik dalam menjalankan prinsip pariwisata syariah, namun masih menghadapi kendala. Pertama, wisata ini sudah berkontribusi pada kesejahteraan umum (kemaslahatan) melalui retribusi daerah, dan pengelola berusaha meningkatkan kualitas layanan. Kedua, pengelolaan uang sudah terstruktur dan transparan (menjaga amanah) melalui penyetoran harian ke bank. Akan tetapi, sistem ini bermasalah karena masih menggunakan bank konvensional, yang bertentangan dengan prinsip syariah (riba). Selain itu, meskipun keamanan lokasi dijaga, praktik pungutan parkir liar merusak rasa aman dan kenyamanan pengunjung. Ketiga, penetapan tarif retribusi sudah adil dan sama (universal dan inklusif) untuk semua pengunjung tanpa memandang hari

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kontribusi destinasi wisata dalam mengoptimalkan retribusi Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi, bahwa kontribusi destinasi wisata dari tahun 2015 hingga 2024, dapat disimpulkan beberapa poin kunci Secara keseluruhan, kontribusi destinasi wisata menunjukkan rata-rata yang "Sangat Baik" sebesar 50,51%, yang mengindikasikan peran signifikan destinasi utama seperti Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) serta Taman Panorama Lobang Jepang (TPLJ) dalam mendukung pendapatan retribusi daerah. Namun, di balik rata-rata yang mengesankan ini, terdapat fluktuasi yang substansial, mulai dari kontribusi terendah 38,90% Cukup pada tahun 2015 hingga puncak 88,39% Sangat Baik pada tahun 2024. Fluktuasi ini tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat dikelola seperti jumlah kunjungan wisatawan, kondisi infrastruktur, dan efektivitas promosi, tetapi juga oleh guncangan eksternal yang tidak

terduga seperti pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Meskipun pengelolaan retribusi di dalam destinasi menunjukkan akuntabilitas, terdapat ketidakselarasan dengan prinsip syariah. Hal ini disebabkan oleh praktik retribusi parkir ilegal yang melanggar prinsip amanah dan kemaslahatan, serta penyetoran hasil retribusi yang masih menggunakan bank konvensional, yang bertentangan dengan syariah

DAFTAR REFERENSI

- Almaputri, S. M., Badu, R. S., & Taruh, V. (2024). Analisis pendapatan objek wisata dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bone Bolango tahun 2020-2022. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(7). <https://doi.org/10.1047467/elmal.v5i72249>
- Arini Dwi, D., et al. (2023). *Strategi peningkatan retribusi daerah*. CV Kreator Cerdas Indonesia.
- Arsjad. (2019). *Keuangan negara*. Intermedia.
- Ashoer, M., Nasrullah, et al. (2021). *Ekonomi pariwisata*. Yayasan Kita Menulis.
- Baso, R., & Syahrani Mutmainnah. (2024). Analisis penerimaan retribusi sektor pariwisata dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Ilmiah Neraca*, 7(2). <https://doi.org/10.56070/jinema.v8i2.125>
- Batin, M. H. (2022). *Keuangan publik*. Prenada Media.
- Damanik, J. (2017). *Pariwisata Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Darwin. (2016). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Mitra Wacana Media.
- Deki, J. (2020). Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi pariwisata air terjun Berawan di Kabupaten Bengkayang. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(4), 358–368. <http://dx.doi.org/10.26418/gov.v8i4.2558>
- Departemen Agama RI. (2022). *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Al Huda.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2016). Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.
- Fanani Rohma, F. (2023). Kontribusi pajak dan retribusi daerah di sektor pariwisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2). <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i2.8235>
- Hadinoto, K. (2020). *Perencanaan pengembangan destinasi pariwisata*. UI Press.
- Hasibuan, I. M., et al. (2023). Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional. *Jurnal Masharif al-Syar'iyah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2), 1–10. <http://doi.org/10.24952/masharif.v3i2.19260>

- Hermin. (2024). Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Mamasa. *Jurnal Syntax Administration*, 5(9). <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i9.1559>
- Huda, N., et al. (2016). *Keuangan publik Islami: Pendekatan teoritis dan sejarah*. Kencana.
- Isdarmanto. (2017). *Dasar dasar kepariwisataan dan destinasi pengelolaan pariwisata*. Gerbang Media Aksara.
- Ismayanti. (2020). *Pengantar pariwisata*. Gramedia Widisarana.
- Kamaroellah, A. (2021). *Pajak dan retribusi daerah*. CV. Jakad Media Publishing.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (1996). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690/900/327 Tahun 1996 tentang pedoman pengelolaan retribusi daerah.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Modul standarisasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota*.
- Maksimilianus, A. (2024). *Destinasi wisata unggulan: Strategi pengembangan dan pemasaran*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Muhammad Hatta, Salih, A., & Misra. (2024). Pengaruh wisata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Parepare. *Cateris Paribus Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.31850/cpj.v4i1.3027>
- Muljadi, A. J. (2017). *Kepariwisataan dan perjalanan*. Raja Grafindo Persada.
- Pratama, I. G. N. W., Lilasari, L. N. T., & Widana, I. B. G. A. (2024). Dampak pariwisata terhadap ekonomi di destinasi Ubud pasca pencabutan pembatasan jalan. *Jurnal Kepariwisataan*, 23(2), 129. <https://doi.org/10.52352/jpar.v23i2.1522>
- Priyono, A. W. H. (2023). *Manajemen pariwisata*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Rivandi, M., & Armayeni, S. (2023). Analisis kontribusi retribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (studi kasus pada Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014-2023). *Jurnal Media Akademik*, 2(5). <https://doi.org/10.62281/v2i5.296>
- Rossen, H. S. (2020). *Public finance: Essay for the Encyclopedia of Public Choice* (CEPS Working Paper No. 80). Princeton University.
- Soebechi, I. (2021). *Judicial review perda pajak dan retribusi daerah*. Sinar Grafika.
- Soebechi, I. (2023). *Dasar-dasar ilmu keuangan negara*. FE-UGM.
- Staff Divisi Pengembangan Destinasi Wisata, Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi. (2024, 16 Desember). [Wawancara pribadi].
- Suprapto, S., & Purbowati, R. (2024). Kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah (PAD). *Jurnal Akuntansi Neraca*, 2(1). <https://doi.org/10.59837/jan.v2i1.28>

- Tafriji, A. (2022). *Keuangan publik teori dan implementasi pengambilan keputusan publik*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Tohir Bawazir. (2023). *Panduan praktis wisata syariah*. Pustaka Al-Kautsar.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- UNWTO. (2017). *A practical guide to tourism destination management*. World Tourism Organization.
- Yani, A. (2020). *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia (Edisi revisi)*. Rajawali Pers.
- Yoeti, O. A. (2016). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Balai Pustaka.